

JMCB: Jurnal Mitra Cendekia Berkarya

<https://journal.ppsuniyap.id/index.php/jmcb>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.



Edukasi Keorganisasian untuk Penguatan Tata Kelola pada Musyawarah Wilayah KKSS

Abdul Rasyid^{*1}, Mohamad Aldrin Akbar², Muh Sawir³, Abdul Rasyid⁴, Duta Mustajab⁵

^{*1,5} Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

^{2,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua

Corresponding author.

E-mail address: abdulrasyidfeuniyap72@gmail.com

Author(s) Statement

Penulis (penulis) menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

Abstract

Tata kelola organisasi yang sistematis memerlukan pemahaman mengenai tujuan kelembagaan, pembagian peran, pengambilan keputusan, program kerja, administrasi, serta akuntabilitas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi keorganisasian kepada peserta Musyawarah Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) sebagai upaya mendukung penguatan tata kelola organisasi. Kegiatan menggunakan pendekatan edukatif melalui tahapan identifikasi kebutuhan, persiapan materi, penyampaian edukasi keorganisasian, penguatan pemahaman tata kelola, evaluasi, dan tindak lanjut. Materi mencakup tujuan dan mandat organisasi, pembagian peran, koordinasi, mekanisme musyawarah, penyusunan program kerja, administrasi, serta akuntabilitas. Hasil kegiatan menunjukkan terlaksananya sesi edukasi keorganisasian dan tersusunnya kerangka penerapan tata kelola yang menghubungkan tujuan organisasi, pembagian peran, pengambilan keputusan, program kerja, administrasi, akuntabilitas, serta evaluasi dan tindak lanjut. Perubahan tingkat pemahaman peserta belum diukur secara kuantitatif karena kegiatan tersebut belum dilengkapi dengan instrumen pretest-posttest. Kegiatan ini memberikan kerangka praktis bagi pengurus untuk menindaklanjuti hasil Muswil melalui pembagian tanggung jawab, penataan administrasi, dokumentasi keputusan, penyusunan program kerja, serta evaluasi berkelanjutan.

Kata kunci: edukasi keorganisasian; tata kelola organisasi; penguatan kapasitas; Musyawarah Wilayah; KKSS.

Pendahuluan

Organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting sebagai wadah partisipasi, penguatan solidaritas, serta pengembangan hubungan sosial antara anggota dan masyarakat. Keberlanjutan organisasi tidak cukup bergantung pada terbentuknya struktur kepengurusan, tetapi juga memerlukan kapasitas kelembagaan yang mampu menerjemahkan visi dan misi ke dalam pembagian tugas, koordinasi, pengambilan keputusan, program kerja, administrasi, serta pertanggungjawaban. Dalam organisasi berbasis komunitas, penguatan kapasitas kelembagaan menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa sumber daya dan struktur yang tersedia dapat diarahkan pada pencapaian tujuan

organisasi. Tata kelola dan evaluasi internal yang dilakukan secara sistematis dapat membantu organisasi mengenali kekuatan, kelemahan, serta kebutuhan pengembangan kapasitas (Carman & Millesen, 2023).

Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) merupakan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai wadah kebersamaan masyarakat Sulawesi Selatan di berbagai wilayah di Indonesia. Nilai persaudaraan, kebersamaan, harmonisasi, dan kerja sama menjadi bagian dari orientasi kelembagaan KKSS. Nilai tersebut perlu didukung oleh tata kelola organisasi yang mampu menghubungkan tujuan kelembagaan dengan fungsi kepengurusan serta kebutuhan anggota. Kejelasan peran, komunikasi antarpengurus, tertib administrasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan kesinambungan program merupakan elemen yang diperlukan agar organisasi mampu mempertahankan keberlanjutan aktivitasnya sekaligus membangun akuntabilitas kepada anggota dan lingkungan sosial.

Secara regulatif, keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia memiliki landasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Regulasi tersebut memberikan kerangka mengenai hak dan kewajiban, kepengurusan, keanggotaan, serta kedudukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam penyelenggaraan organisasi. Pada tingkat internal, tata kelola organisasi tetap mengacu pada ketentuan kelembagaan yang berlaku. Keselarasan antara regulasi, aturan internal, dan praktik organisasi diperlukan untuk membangun proses kelembagaan yang tertib, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu forum strategis dalam kehidupan organisasi adalah Musyawarah Wilayah (Muswil). Forum ini menjadi ruang untuk membahas perkembangan organisasi, mengevaluasi program, merumuskan agenda, serta menentukan arah kelembagaan pada periode berikutnya. Musyawarah memiliki arti penting ketika keputusan yang dihasilkan dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang jelas. Setiap keputusan memerlukan pembagian tanggung jawab, target kegiatan, jadwal pelaksanaan, koordinasi, dokumentasi, serta mekanisme pemantauan. Dengan demikian, kualitas penyelenggaraan organisasi setelah Muswil sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengurus dalam mengoperasionalkan hasil musyawarah menjadi program dan aktivitas kelembagaan.

Kapasitas pengurus menjadi salah satu faktor penting dalam proses tersebut. Pengurus memerlukan pemahaman mengenai hubungan antara tujuan organisasi, struktur, kewenangan, pembagian tugas, koordinasi, administrasi, dan pertanggungjawaban. Ketidakjelasan fungsi dan tanggung jawab berpotensi menimbulkan tumpang tindih pekerjaan, lemahnya koordinasi, serta kesulitan dalam menelusuri pelaksanaan keputusan. Dalam kajian organisasi nirlaba, penguatan tata kelola dan kapasitas organisasi berkaitan dengan kemampuan struktur kepemimpinan untuk melakukan refleksi, evaluasi, serta perbaikan terhadap praktik kelembagaan (Carman & Millesen, 2023). Artinya, peningkatan kapasitas organisasi perlu diarahkan pada kemampuan pengurus untuk menghubungkan pengetahuan keorganisasian dengan praktik pengelolaan organisasi.

Administrasi merupakan bagian lain yang menentukan kesinambungan tata kelola. Dokumen seperti daftar kepengurusan, surat-menyurat, notula rapat, register keputusan, rencana kerja, kalender kegiatan, dan laporan pelaksanaan berfungsi sebagai rekam jejak kelembagaan. Dokumentasi yang tertib memungkinkan keputusan ditelusuri, perkembangan program dipantau, serta tanggung jawab di setiap bidang diketahui dengan lebih jelas. Administrasi yang konsisten memiliki arti strategis ketika terjadi pergantian kepengurusan karena pengetahuan organisasi tidak semata-mata melekat pada individu, melainkan tersimpan dalam dokumen dan sistem kelembagaan.

Penguatan kapasitas pengurus dapat dilakukan melalui kegiatan edukasi keorganisasian yang menghubungkan pengetahuan dengan persoalan praktis di dalam organisasi. Edukasi memberikan ruang bagi peserta untuk memahami kembali tujuan kelembagaan, pembagian mandat, mekanisme koordinasi, tata cara pengambilan keputusan, perencanaan program, administrasi, serta akuntabilitas. Pendekatan pengembangan kapasitas pada dasarnya perlu diarahkan melampaui penyampaian materi menuju kemampuan peserta untuk menggunakan pengetahuan tersebut dalam praktik organisasi.

Bourgeois et al. (2023) menekankan bahwa pengembangan kapasitas memerlukan perhatian terhadap proses pembelajaran, konteks kelembagaan, dan penggunaan kemampuan yang telah dibangun agar manfaat program dapat dipertahankan.

Keberhasilan kegiatan penguatan kapasitas pun tidak tepat dinilai hanya berdasarkan terlaksananya sesi penyampaian materi. Evaluasi perlu mempertimbangkan keterjangkauan kegiatan, respons peserta, proses pembelajaran, penerapan pengetahuan, serta hasil yang diperoleh setelah kegiatan tersebut. Rucks et al. (2024) menunjukkan bahwa evaluasi pengembangan kapasitas dapat dilakukan secara bertingkat melalui aspek implementasi dan jangkauan, kepuasan, pembelajaran, penerapan, serta dampak. Kerangka tersebut relevan bagi kegiatan edukasi keorganisasian karena perubahan kapasitas pengurus idealnya terlihat pada praktik setelah kegiatan, misalnya kejelasan pembagian tugas, kualitas dokumentasi keputusan, penyusunan program kerja, serta konsistensi dalam pelaksanaan tindak lanjut.

Dalam konteks Muswil KKSS, edukasi keorganisasian menjadi sarana untuk menghubungkan momentum musyawarah dengan kebutuhan penguatan tata kelola. Materi diarahkan pada pemahaman tujuan dan mandat organisasi, pembagian tugas pengurus, mekanisme musyawarah, penyusunan program kerja, administrasi, akuntabilitas, serta hubungan organisasi dengan masyarakat. Orientasi tersebut menempatkan kegiatan pengabdian sebagai proses berbagi pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan pengelolaan organisasi, sekaligus memberikan kerangka praktis agar hasil musyawarah dapat diterjemahkan ke dalam agenda kerja yang lebih sistematis.

1.1 Kondisi dan Permasalahan Sasaran

Muswil mempertemukan unsur organisasi untuk membahas arah kelembagaan serta berbagai agenda yang berkaitan dengan keberlanjutan organisasi. Kondisi tersebut menuntut pemahaman bersama mengenai tujuan organisasi, fungsi kepengurusan, kewenangan setiap bidang, pola koordinasi, serta mekanisme untuk menerjemahkan keputusan menjadi program kerja. Pengurus tidak cukup mengetahui posisi dalam struktur organisasi, tetapi perlu memahami hubungan antara mandat, pekerjaan yang harus dilakukan, pihak yang bertanggung jawab, waktu pelaksanaan, dan mekanisme pelaporan.

Permasalahan yang menjadi dasar kegiatan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa tata kelola KKSS belum berjalan dengan baik. Data empiris yang tersedia belum memadai untuk memberikan penilaian tersebut. Permasalahan lebih tepat dirumuskan sebagai kebutuhan untuk memperkuat pemahaman keorganisasian bagi pengurus dan peserta Muswil, khususnya terkait pembagian peran, koordinasi, pengelolaan keputusan, penyusunan program, administrasi, serta akuntabilitas. Rumusan tersebut membuat kegiatan pengabdian berorientasi pada pengembangan kapasitas tanpa memberikan penilaian terhadap kondisi internal mitra yang tidak didukung oleh bukti.

Kebutuhan berikutnya berkaitan dengan kesinambungan antara keputusan Muswil dan pelaksanaan program. Keputusan yang telah disepakati memerlukan mekanisme tindak lanjut agar dapat diwujudkan menjadi aktivitas organisasi. Setiap keputusan idealnya memiliki penanggung jawab, batas waktu, kebutuhan sumber daya, indikator pelaksanaan, serta dokumentasi perkembangan. Ketertiban tersebut membantu organisasi memantau sekaligus membangun pertanggungjawaban atas agenda yang telah disepakati. Penguatan kapasitas organisasi melalui proses evaluasi dan refleksi internal dapat membantu pengurus mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan serta mengarahkan sumber daya pada kebutuhan kelembagaan yang lebih prioritas (Carman & Millesen, 2023).

Program kerja menjadi aspek lain yang membutuhkan perhatian karena keberhasilan organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya kegiatan. Program perlu disusun berdasarkan tujuan, kebutuhan anggota, kapasitas sumber daya, serta konteks sosial tempat organisasi beroperasi. Bagi organisasi kemasyarakatan yang berada di Papua, pelaksanaan program perlu memperhatikan komunikasi dan hubungan sosial yang konstruktif dengan masyarakat setempat. Pendekatan tersebut memungkinkan organisasi menjalankan fungsi internal bagi anggota sekaligus membangun interaksi sosial yang harmonis dengan lingkungan tempat organisasi berada.

1.2 Solusi yang Ditawarkan

Berdasarkan kebutuhan tersebut, solusi yang ditawarkan melalui kegiatan pengabdian ini berupa edukasi keorganisasian yang terintegrasi dalam forum Muswil KKSS. Edukasi diarahkan untuk memberikan kerangka pemahaman mengenai keterkaitan antara tujuan organisasi, struktur kepengurusan, pembagian kewenangan, mekanisme musyawarah, program kerja, administrasi, akuntabilitas, dan tindak lanjut. Pendekatan tersebut dipilih agar materi tidak berhenti pada konsep, tetapi juga memiliki keterkaitan langsung dengan tanggung jawab pengurus dalam menjalankan organisasi. Substansi edukasi keorganisasian disusun berdasarkan aspek yang berkaitan langsung dengan tata kelola dan pelaksanaan fungsi organisasi. Setiap materi diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai hubungan antara tujuan organisasi, pembagian tanggung jawab, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, hingga evaluasi dan tindak lanjut. Pokok materi edukasi tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Substansi Materi Edukasi Keorganisasian pada Muswil KKSS

Substansi Edukasi	Fokus Penguatan
Tujuan dan Mandat Organisasi	Memahami arah, fungsi, dan mandat sebagai dasar pelaksanaan kegiatan organisasi.
Pembagian Peran Pengurus	Memperjelas tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing unsur kepengurusan.
Koordinasi Antarbidang	Memperkuat komunikasi dan keterhubungan dalam pelaksanaan tugas antarunsur organisasi.
Musyawarah dan Keputusan	Memahami mekanisme pengambilan dan pencatatan keputusan secara teratur.
Penyusunan Program Kerja	Menerjemahkan keputusan organisasi menjadi kegiatan, sasaran, jadwal, dan penanggung jawab.
Administrasi Organisasi	Memperkuat pengelolaan dokumen, notula, surat-menyurat, dan rekam jejak kegiatan organisasi.
Akuntabilitas Kegiatan	Memperkuat pelaporan, pertanggungjawaban, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan program.

Sumber: Diolah oleh Tim Pengabdian, 2025.

Tabel 2 menunjukkan bahwa materi edukasi tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam pengelolaan organisasi. Pemahaman terhadap tujuan dan mandat menjadi dasar pembagian peran dan koordinasi, sedangkan hasil musyawarah diterjemahkan ke dalam program kerja yang didukung oleh administrasi serta mekanisme pertanggungjawaban. Keterhubungan tersebut membentuk siklus keputusan → pembagian tanggung jawab → perencanaan → pelaksanaan → dokumentasi → evaluasi → tindak lanjut, sehingga edukasi keorganisasian diarahkan pada pemahaman tata kelola yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

1.3 Tujuan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi keorganisasian kepada peserta Musyawarah Wilayah KKSS sebagai upaya memperkuat pemahaman tentang tata kelola organisasi. Secara khusus, kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai tujuan dan mandat organisasi, pembagian peran pengurus, mekanisme koordinasi dan musyawarah, penyusunan program kerja, tertib administrasi, akuntabilitas, serta pentingnya menindaklanjuti keputusan organisasi secara sistematis.

Melalui kegiatan tersebut, Muswil diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai momentum pembelajaran organisasi yang menghubungkan proses pengambilan keputusan dengan pelaksanaan program. Edukasi keorganisasian memberikan kerangka agar peserta memahami bahwa keberlanjutan organisasi memerlukan keterhubungan antara tujuan, struktur, keputusan, tanggung jawab, program, dokumentasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Dengan orientasi tersebut, kegiatan pengabdian diarahkan untuk mendukung pengembangan tata kelola organisasi yang tertib, partisipatif, akuntabel, serta mampu menjaga kesinambungan program sesuai dengan tujuan kelembagaan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk edukasi keorganisasian pada forum Musyawarah Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (Muswil KKSS). Pendekatan kegiatan bersifat edukatif dengan menempatkan penyampaian materi sebagai sarana untuk memperkuat pemahaman peserta tentang tata kelola organisasi. Materi diarahkan pada persoalan praktis yang berkaitan dengan tujuan dan mandat organisasi, pembagian peran pengurus, mekanisme musyawarah, penyusunan program kerja, administrasi, akuntabilitas, serta tindak lanjut keputusan organisasi. Pendekatan pengembangan kapasitas semacam ini menempatkan proses pembelajaran sebagai sarana untuk menghubungkan pengetahuan dengan praktik kelembagaan (Bourgeois et al., 2023).

Metode pelaksanaan disusun secara bertahap agar proses edukasi memiliki keterkaitan antara kebutuhan organisasi, substansi materi, pelaksanaan kegiatan, dan tindak lanjut. Secara konseptual, rangkaian kegiatan meliputi identifikasi kebutuhan → persiapan materi → pelaksanaan edukasi → penguatan pemahaman keorganisasian → evaluasi → tindak lanjut. Tahapan tersebut digunakan untuk memberikan kerangka yang sistematis bagi pelaksanaan PkM sekaligus menjadi dasar pengembangan kegiatan pada periode berikutnya.

2.1 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah peserta Muswil KKSS, khususnya unsur organisasi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepengurusan serta tindak lanjut hasil musyawarah. Penetapan sasaran tersebut didasarkan pada karakter kegiatan yang berorientasi pada penguatan pemahaman tata kelola organisasi. Pengurus dan unsur organisasi merupakan pihak yang berperan dalam menerjemahkan keputusan forum ke dalam pembagian tugas, program kerja, administrasi, koordinasi, serta pelaporan kegiatan.

Kegiatan dilaksanakan dalam rangkaian Muswil KKSS sebagai forum organisasi yang mempertemukan para peserta untuk membahas kepentingan kelembagaan. Integrasi edukasi keorganisasian dalam forum tersebut memungkinkan materi disampaikan dalam konteks yang lebih dekat dengan kebutuhan peserta. Dengan demikian, substansi pembelajaran dapat diarahkan pada situasi yang dihadapi dalam menjalankan organisasi, bukan semata-mata membahas konsep keorganisasian secara teoritis.

2.2 Tahap Persiapan Kegiatan

Tahap persiapan diarahkan pada penyusunan substansi edukasi berdasarkan kebutuhan dasar tata kelola organisasi. Identifikasi kebutuhan dilakukan dengan memperhatikan fungsi Muswil sebagai forum pengambilan keputusan serta kebutuhan pengurus dalam menerjemahkan keputusan tersebut menjadi agenda yang dapat dilaksanakan. Fokus persiapan ditempatkan pada materi yang memiliki keterkaitan langsung dengan pekerjaan organisasi.

Materi edukasi dikelompokkan ke dalam beberapa pokok pembahasan, yaitu (1) tujuan dan mandat organisasi; (2) struktur dan pembagian tugas pengurus; (3) koordinasi dan komunikasi organisasi; (4) mekanisme musyawarah dan pengambilan keputusan; (5) penyusunan program kerja; (6) administrasi dan dokumentasi organisasi; serta (7) akuntabilitas dan tindak lanjut program. Pengelompokan materi dimaksudkan agar peserta memperoleh gambaran mengenai keterhubungan antara aspek kelembagaan dan pekerjaan operasional pengurus.

Penyusunan materi menggunakan pendekatan praktis dengan menghubungkan konsep keorganisasian dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Tujuan organisasi ditempatkan sebagai dasar penentuan program, sedangkan struktur menjadi dasar pembagian tanggung jawab. Keputusan musyawarah kemudian diarahkan pada program dan kegiatan yang memiliki penanggung jawab, jadwal, kebutuhan sumber daya, dokumentasi, serta mekanisme evaluasi. Pola tersebut memungkinkan materi edukasi mengikuti siklus pengelolaan organisasi secara lebih sistematis.

2.3 Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemaparan materi keorganisasian dalam forum Muswil KKSS. Penyampaian materi diarahkan pada pemahaman tentang hubungan antara tujuan organisasi dan tanggung jawab pengurus dalam menjalankan fungsi kelembagaan. Pembahasan dimulai dari posisi tujuan dan mandat organisasi sebagai landasan penyusunan aktivitas, kemudian diarahkan pada struktur, pembagian tugas, mekanisme koordinasi, serta proses pengambilan keputusan.

Materi berikutnya berfokus pada penerjemahan keputusan organisasi menjadi program kerja. Pada bagian ini ditekankan bahwa keputusan musyawarah memerlukan tindak lanjut yang jelas melalui penetapan kegiatan, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme pemantauan. Program kerja ditempatkan sebagai instrumen untuk menghubungkan keputusan strategis dengan aktivitas organisasi sehingga setiap bidang memiliki arah pelaksanaan yang dapat ditelusuri.

Aspek administrasi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam materi edukasi. Peserta diperkenalkan pada fungsi dokumen organisasi seperti notula, surat-menyurat, register keputusan, rencana kerja, kalender kegiatan, dan laporan pelaksanaan. Dokumentasi tersebut diperlukan untuk menjaga rekam jejak kelembagaan serta menjadi dasar pemantauan dan pertanggungjawaban program. Melalui pemahaman ini, administrasi tidak hanya ditempatkan sebagai kegiatan pencatatan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem tata kelola organisasi.

2.4 Metode Penyampaian Materi

Metode utama yang terdokumentasi dalam kegiatan ini adalah pemaparan edukatif di hadapan forum Muswil. Metode ini digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok keorganisasian secara terstruktur dan menghubungkannya dengan kebutuhan pengelolaan organisasi. Penyampaian materi diarahkan pada contoh-contoh praktis seperti pembagian tanggung jawab, pencatatan keputusan, penyusunan program, dan dokumentasi kegiatan sehingga substansi yang disampaikan lebih mudah dikaitkan dengan tugas pengurus.

Dalam kerangka pengembangan kegiatan berikutnya, metode pemaparan dapat diperkuat melalui diskusi kasus, identifikasi persoalan organisasi, simulasi pembagian tugas, serta latihan menyusun tindak lanjut atas keputusan. Pengembangan metode tersebut penting agar pembelajaran bergerak dari penerimaan informasi menuju proses refleksi dan penerapan. Pengembangan kapasitas yang berkelanjutan membutuhkan kesempatan bagi peserta untuk menggunakan pengetahuan dalam konteks pekerjaan dan organisasi mereka (Bourgeois et al., 2023).

2.5 Materi Edukasi Keorganisasian

Materi edukasi disusun untuk memberikan pemahaman yang terintegrasi tentang tata kelola organisasi. Pembahasan mengenai tujuan dan mandat organisasi diarahkan agar peserta mampu memahami alasan keberadaan organisasi serta hubungan antara visi, misi, dan program. Materi struktur dan pembagian tugas menekankan pentingnya kejelasan kewenangan dan tanggung jawab setiap unsur kepengurusan untuk mengurangi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

Materi musyawarah dan pengambilan keputusan membahas pentingnya proses pengambilan keputusan yang mengikuti mekanisme organisasi serta didokumentasikan secara tertib. Pembahasan program kerja diarahkan pada kemampuan menerjemahkan keputusan menjadi sasaran, kegiatan, penanggung jawab, jadwal, serta kebutuhan sumber daya. Materi administrasi dan akuntabilitas menekankan dokumentasi kegiatan serta pelaporan sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada organisasi dan para anggota.

Muatan edukasi tersebut disusun sebagai satu rangkaian agar peserta dapat memahami bahwa tata kelola organisasi merupakan proses yang saling terhubung. Tujuan organisasi memberikan arah, struktur menentukan pembagian peran, musyawarah menghasilkan keputusan, program kerja menerjemahkan keputusan menjadi tindakan, sedangkan administrasi dan evaluasi memberikan dasar untuk menilai serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tersebut.

2.6 Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan ditempatkan sebagai bagian dari proses untuk menilai keterlaksanaan edukasi dan menjadi dasar penyempurnaan program berikutnya. Rucks et al. (2024) menjelaskan bahwa evaluasi kegiatan pengembangan kapasitas dapat dilakukan secara bertingkat dengan memperhatikan implementasi dan jangkauan program, respons peserta, pembelajaran, penerapan, serta dampaknya. Kerangka tersebut dapat digunakan untuk membedakan antara keberhasilan dalam menyelenggarakan kegiatan dan perubahan kapasitas yang terjadi setelah peserta mengikuti edukasi.

Pada kegiatan ini, evaluasi dibatasi pada keterlaksanaan sesi edukasi dan dokumentasi kegiatan karena data pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan belum tersedia. Dengan demikian, kegiatan ini tidak digunakan untuk menyimpulkan adanya peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku, maupun peningkatan kapasitas organisasi secara kuantitatif. Pembatasan tersebut diperlukan agar pelaporan hasil tetap sesuai dengan bukti yang tersedia.

Untuk pelaksanaan berikutnya, evaluasi dapat dikembangkan dengan menggunakan pertanyaan singkat sebelum dan sesudah penyampaian materi untuk mengukur perubahan pemahaman peserta. Evaluasi lanjutan dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumen organisasi, seperti matriks pembagian tugas, notula keputusan, program kerja, kalender kegiatan, dan laporan tindak lanjut. Dengan mekanisme tersebut, evaluasi tidak hanya mengukur respons peserta terhadap materi, tetapi juga dapat menilai sejauh mana pengetahuan tersebut diterapkan dalam praktik organisasi.

2.7 Tindak Lanjut Kegiatan

Tindak lanjut diarahkan pada penerapan substansi edukasi dalam pengelolaan organisasi. Pengurus dapat mengembangkan matriks pembagian tugas, kalender program kerja, register keputusan, sistem dokumentasi, serta mekanisme pemantauan terhadap keputusan Muswil. Instrumen tersebut dapat membantu memastikan bahwa hasil musyawarah memiliki penanggung jawab dan perkembangan pelaksanaannya dapat ditelusuri.

Pendampingan berikutnya dapat diarahkan pada penyusunan program kerja yang lebih sistematis, penataan administrasi, serta evaluasi berkala terhadap tindak lanjut keputusan. Pendekatan tersebut menempatkan edukasi keorganisasian sebagai tahap awal dalam proses penguatan kapasitas organisasi secara berkelanjutan. Manfaat pengembangan kapasitas dapat dinilai secara lebih komprehensif ketika pengetahuan yang diperoleh diterapkan dalam praktik kelembagaan (Bourgeois et al., 2023; Rucks et al., 2024).

Pelaksanaan kegiatan disusun melalui tahapan yang menghubungkan kebutuhan organisasi dengan proses edukasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Setiap tahapan memiliki fokus dan luaran yang berbeda sehingga kegiatan tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi diarahkan pada penerapan pengetahuan dalam pengelolaan organisasi. Rangkaian tahapan pelaksanaan kegiatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Edukasi Keorganisasian pada Muswil KKSS

Kegiatan	Fokus Pelaksanaan	Luaran yang Diharapkan
Identifikasi Kebutuhan	Mengidentifikasi kebutuhan untuk memperkuat pemahaman tentang tata kelola organisasi.	Teridentifikasinya pokok materi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Persiapan Materi	Menyusun materi mengenai tujuan organisasi, pembagian tugas, koordinasi, musyawarah, program kerja, administrasi, serta akuntabilitas.	Tersusunnya materi edukasi keorganisasian secara sistematis.
Edukasi Keorganisasian	Menyampaikan materi dengan menghubungkan konsep tata kelola dan pelaksanaan fungsi organisasi.	Tersampainya pengetahuan dasar keorganisasian kepada peserta.
Penguatan Pemahaman Tata Kelola	Menjelaskan keterkaitan antara keputusan, pembagian tanggung jawab, program kerja, dokumentasi, dan pertanggungjawaban.	Terbangunnya kerangka pemahaman tentang pengelolaan organisasi.

Kegiatan	Fokus Pelaksanaan	Luaran yang Diharapkan
Evaluasi Kegiatan	Menelaah pelaksanaan edukasi dan dokumentasi kegiatan sebagai bahan pengembangan program.	Tersedianya informasi untuk penyempurnaan kegiatan berikutnya.
Tindak Lanjut Organisasi	Mengarahkan penerapan materi melalui program kerja, administrasi, dokumentasi keputusan, serta pemantauan hasil Muswil.	Tersedianya arahan untuk menerapkan hasil edukasi dalam pengelolaan organisasi.

Sumber: Diolah oleh Tim Pengabdian, 2025.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa kegiatan edukasi keorganisasian dirancang sebagai proses yang saling berkaitan mulai dari identifikasi kebutuhan hingga tindak lanjut organisasi. Muswil menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai tata kelola, sedangkan tahap tindak lanjut diarahkan pada penerapan materi melalui pembagian tanggung jawab, program kerja, administrasi, dokumentasi keputusan, serta evaluasi. Pada pelaksanaan berikutnya, model tersebut dapat dilengkapi dengan instrumen evaluasi yang lebih terukur sehingga perkembangan pengetahuan peserta dan penerapan hasil edukasi dapat dinilai berdasarkan bukti empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan edukasi keorganisasian pada Musyawarah Wilayah KKSS menjadi ruang untuk menghubungkan forum organisasi dengan proses penguatan pemahaman tentang tata kelola kelembagaan. Kegiatan difokuskan pada aspek yang dekat dengan tugas pengurus, meliputi tujuan dan mandat organisasi, pembagian peran, koordinasi, mekanisme musyawarah dan pengambilan keputusan, penyusunan program kerja, administrasi, akuntabilitas, serta tindak lanjut keputusan. Substansi tersebut menempatkan tata kelola organisasi sebagai rangkaian yang saling berhubungan, bukan sebagai fungsi yang berjalan terpisah.

Hasil kegiatan yang dapat diidentifikasi berdasarkan dokumentasi adalah terlaksananya sesi pemaparan materi keorganisasian dalam forum Muswil KKSS. Sementara itu, perubahan pengetahuan peserta maupun penerapan materi setelah kegiatan belum diukur menggunakan instrumen kuantitatif. Dengan demikian, pembahasan difokuskan pada substansi edukasi, relevansinya terhadap penguatan tata kelola organisasi, serta arah penerapan materi dalam praktik kelembagaan. Pendekatan ini penting agar interpretasi hasil tetap selaras dengan bukti kegiatan yang tersedia.

3.1 Pelaksanaan Edukasi Investasi dan Pasar Modal

3.1 Pelaksanaan Edukasi Keorganisasian

Edukasi keorganisasian dilaksanakan melalui pemaparan materi kepada para peserta Forum Muswil KKSS. Kegiatan tersebut memberikan ruang untuk menempatkan persoalan keorganisasian sebagai bagian dari agenda pembelajaran bersama. Materi diarahkan pada pemahaman bahwa keberlangsungan organisasi membutuhkan keterhubungan antara tujuan kelembagaan, struktur kepengurusan, pembagian tanggung jawab, keputusan organisasi, program kerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan.

Penyampaian materi pada momentum Muswil relevan karena forum tersebut berkaitan langsung dengan proses pengambilan keputusan dan penentuan arah organisasi. Edukasi dalam konteks ini tidak semata-mata memberikan pengetahuan konseptual, tetapi juga diarahkan untuk membantu peserta memahami hubungan antara keputusan yang dihasilkan dalam forum dan pekerjaan organisasi setelah Muswil. Pengembangan kapasitas akan lebih bermakna ketika pengetahuan dapat dihubungkan dengan konteks kelembagaan dan digunakan dalam praktik organisasi (Bourgeois et al., 2023).

Dokumentasi kegiatan menunjukkan adanya pemaparan materi melalui podium dalam forum yang diikuti oleh para peserta kegiatan. Dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai bukti keterlaksanaan sesi edukasi, sedangkan informasi mengenai peningkatan pengetahuan peserta memerlukan instrumen evaluasi tersendiri.



Gambar 1. Pelaksanaan Edukasi Keorganisasian pada Forum Muswil KKSS
Sumber: Dokumentasi kegiatan, 2025.

3.2 Penguatan Pemahaman Tujuan dan Mandat Organisasi

Salah satu substansi penting dalam edukasi keorganisasian adalah pemahaman mengenai tujuan dan mandat organisasi. Tujuan organisasi memberikan arah terhadap aktivitas yang dilaksanakan, sedangkan mandat menentukan ruang tanggung jawab yang perlu dijalankan oleh unsur kepengurusan. Pemahaman terhadap kedua aspek tersebut diperlukan agar kegiatan organisasi tidak berkembang secara sporadis dan terpisah dari visi, misi, serta keputusan kelembagaan.

Dalam proses edukasi, hubungan antara tujuan organisasi dan pelaksanaan program ditempatkan sebagai satu kesatuan. Setiap kegiatan idealnya dapat ditelusuri keterkaitannya dengan tujuan organisasi. Pendekatan tersebut membantu pengurus dalam menentukan prioritas sekaligus menjadi dasar untuk mengevaluasi relevansi suatu program. Penguatan kapasitas organisasi membutuhkan kemampuan untuk melakukan refleksi terhadap tujuan, sumber daya, struktur, dan praktik kelembagaan sehingga organisasi dapat mengenali kebutuhannya secara lebih sistematis (Carman & Millesen, 2023).

Pemahaman terhadap mandat organisasi juga berkaitan dengan batas kewenangan dalam pengambilan keputusan. Keputusan strategis yang memerlukan persetujuan forum organisasi perlu dibedakan dari pekerjaan teknis yang dapat didelegasikan kepada bidang atau pengurus tertentu. Pembedaan tersebut membantu menjaga proses pengambilan keputusan tetap sesuai dengan tata kerja organisasi sekaligus memberikan ruang bagi pengurus untuk menjalankan tugas secara efektif.

3.3 Pembagian Peran dan Koordinasi Pengurus

Pembagian peran menjadi materi penting karena struktur organisasi baru berfungsi ketika setiap unsur memahami tanggung jawab dan hubungan kerja masing-masing. Jabatan dalam kepengurusan perlu diterjemahkan ke dalam tugas yang jelas, termasuk siapa yang melaksanakan kegiatan,

melakukan koordinasi, memeriksa perkembangan pekerjaan, serta melaporkan hasilnya. Kejelasan tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan ketidakpastian tanggung jawab. Koordinasi diperlukan untuk menghubungkan pekerjaan antarpengurus dan antarbidang. Program organisasi sering kali membutuhkan keterlibatan lebih dari satu unsur, sehingga komunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembagian tugas. Koordinasi yang berjalan secara teratur memungkinkan informasi mengenai perkembangan kegiatan, kebutuhan sumber daya, kendala, dan perubahan rencana disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Materi edukasi menempatkan pembagian tugas bukan sekadar pembagian pekerjaan, melainkan sebagai bentuk akuntabilitas internal organisasi. Setiap tanggung jawab perlu dikaitkan dengan target, waktu pelaksanaan, dan pelaporan. Dengan pola tersebut, pengurus dapat mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas suatu agenda serta bagaimana perkembangan pelaksanaannya dipantau. Salah satu bentuk penerapan yang dapat dikembangkan setelah Muswil adalah matriks pembagian tanggung jawab. Matriks tersebut dapat memuat program atau keputusan, penanggung jawab, unsur pendukung, jadwal pelaksanaan, serta status tindak lanjut. Instrumen sederhana ini membantu mengubah hasil musyawarah menjadi pembagian pekerjaan yang lebih operasional.

3.4 Tata Kelola Musyawarah dan Pengambilan Keputusan

Musyawarah merupakan bagian penting dalam tata kelola organisasi karena menjadi mekanisme untuk membahas kepentingan bersama dan menghasilkan keputusan kelembagaan. Namun, kualitas musyawarah tidak berhenti pada tercapainya kesepakatan. Keputusan perlu dirumuskan secara jelas, didokumentasikan, disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, serta diterjemahkan menjadi tindakan yang dapat dilaksanakan. Edukasi keorganisasian menekankan pentingnya membedakan antara proses pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan keputusan. Forum organisasi berfungsi menghasilkan keputusan sesuai kewenangannya, sedangkan pelaksanaannya memerlukan pembagian tanggung jawab kepada unsur yang telah ditetapkan. Pemisahan tersebut memberikan kejelasan mengenai siapa yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Setiap hasil musyawarah idealnya memiliki rekam administrasi berupa notula atau dokumen keputusan. Dokumen perlu memuatkan sekurang-kurangnya pokok keputusan, waktu penetapan, pihak yang bertanggung jawab, serta arahan tindak lanjut. Dokumentasi memungkinkan organisasi menelusuri dasar suatu program sekaligus menjadi referensi saat dilakukan evaluasi atau pergantian kepengurusan. Dengan demikian, tertib musyawarah dan dokumentasi keputusan memiliki hubungan langsung dengan akuntabilitas organisasi. Keputusan yang terdokumentasi dengan baik memberikan dasar yang lebih kuat bagi pengurus untuk menyusun program dan melaporkan pelaksanaannya kepada anggota.

3.5 Penyusunan Program Kerja Organisasi

Program kerja merupakan instrumen untuk menerjemahkan tujuan dan keputusan organisasi menjadi aktivitas yang dapat dilaksanakan. Materi edukasi menekankan bahwa penyusunan program perlu mempertimbangkan sasaran, bentuk kegiatan, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, kebutuhan sumber daya, serta mekanisme pemantauan. Kerangka tersebut membantu organisasi menghindari program yang hanya berupa daftar kegiatan tanpa arah pencapaian yang jelas.

Penyusunan program perlu memperhatikan kemampuan organisasi serta kebutuhan anggota. Program yang realistis memungkinkan sumber daya organisasi digunakan secara lebih terarah. Dalam konteks organisasi kemasyarakatan, kegiatan dapat mencakup kebutuhan internal anggota maupun kontribusi sosial terhadap lingkungan tempat organisasi beroperasi. Karena itu, perencanaan program perlu mempertimbangkan hubungan organisasi dengan masyarakat serta karakteristik sosial setempat.

Kalender program kerja dapat digunakan sebagai instrumen sederhana untuk memperkuat pelaksanaan. Kalender tersebut dapat memuat kegiatan, sasaran, waktu, penanggung jawab, kebutuhan sumber daya, serta status pelaksanaan. Penggunaan instrumen semacam ini memungkinkan pengurus memantau pelaksanaan program secara berkala sekaligus mengenali

kegiatan yang memerlukan penyesuaian. Program kerja selanjutnya perlu dikaitkan dengan evaluasi. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan sebaiknya ditinjau berdasarkan kesesuaian antara rencana dan realisasi, kendala yang ditemukan, serta langkah perbaikan yang diperlukan. Siklus perencanaan–pelaksanaan–evaluasi–tindak lanjut membuat program organisasi berkembang melalui proses pembelajaran kelembagaan, bukan sekadar pengulangan kegiatan.

3.6 Penguatan Administrasi dan Akuntabilitas Organisasi

Administrasi organisasi menjadi salah satu fokus edukasi karena berfungsi untuk menjaga kesinambungan informasi kelembagaan. Dokumen seperti surat-menyurat, notula, daftar pengurus, register keputusan, program kerja, kalender kegiatan, dan laporan pelaksanaan merupakan bagian dari rekam jejak organisasi. Ketersediaan dokumen tersebut membantu pengurus menelusuri keputusan dan aktivitas yang telah dilakukan. Pengelolaan administrasi yang konsisten memiliki manfaat jangka panjang, terutama saat terjadi pergantian kepengurusan. Informasi mengenai program dan keputusan tidak seharusnya bergantung pada ingatan individu. Dokumentasi memungkinkan pengetahuan kelembagaan diwariskan kepada kepengurusan berikutnya sehingga proses organisasi dapat dilanjutkan tanpa kehilangan informasi penting.

Administrasi memiliki keterkaitan erat dengan akuntabilitas. Pengurus membutuhkan bukti untuk menunjukkan bahwa keputusan telah ditindaklanjuti dan sumber daya digunakan sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Laporan pelaksanaan menjadi sarana untuk menghubungkan perencanaan dengan realisasi serta memberikan informasi kepada anggota mengenai perkembangan program organisasi. Penguatan administrasi melalui edukasi keorganisasian diarahkan pada pembentukan kebiasaan mencatat, menyimpan, menelusuri, dan melaporkan informasi organisasi secara konsisten. Dengan demikian, administrasi tidak diposisikan sebagai pekerjaan pelengkap, melainkan menjadi bagian dari sistem tata kelola yang mendukung transparansi dan pertanggungjawaban.

Tabel 2. Kerangka Penerapan Materi Edukasi Keorganisasian

Bidang Penguatan	Fokus Edukasi	Bentuk Penerapan	Dokumen Pendukung
Tujuan dan Mandat	Keselaran tujuan, kewenangan, dan aktivitas organisasi	Penetapan prioritas dan arah kegiatan	Rumusan hasil Muswil dan ketentuan organisasi
Pembagian Peran	Kejelasan tugas dan tanggung jawab pengurus	Pembagian penanggung jawab kegiatan	Matriks tugas dan tanggung jawab
Musyawaharah dan Keputusan	Ketertiban proses dan dokumentasi keputusan	Pencatatan dan pemantauan hasil musyawarah	Notula dan register keputusan
Program Kerja	Penerjemahan keputusan menjadi kegiatan	Penyusunan sasaran, jadwal, dan penanggung jawab	Program kerja dan kalender kegiatan
Administrasi	Ketertiban pengelolaan informasi organisasi	Penataan surat, arsip, dan dokumen kegiatan	Register surat dan arsip organisasi
Akuntabilitas	Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan	Pelaporan realisasi dan perkembangan program	Laporan kegiatan dan tindak lanjut

Sumber: Diolah oleh Tim Pengabdian, 2025.

Tabel 2 menunjukkan bahwa setiap materi edukasi memiliki keterkaitan dengan bentuk penerapan serta dokumen pendukung yang dapat digunakan dalam pengelolaan organisasi. Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa penguatan keorganisasian tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi juga diarahkan pada pembentukan instrumen kerja yang membantu pengurus menerjemahkan keputusan menjadi program, mendokumentasikan pelaksanaan, serta mempertanggungjawabkan hasilnya.

3.7 Indikasi Hasil dan Evaluasi Kegiatan

Berdasarkan bukti yang tersedia, hasil yang dapat dinyatakan secara objektif adalah terlaksananya sesi edukasi keorganisasian dalam forum Muswil KKSS serta tersusunnya kerangka materi yang berkaitan dengan tata kelola organisasi. Dokumentasi kegiatan menunjukkan adanya proses pemaparan materi. Hasil tersebut menunjukkan keterlaksanaan aktivitas pengabdian, tetapi belum menjadi bukti bahwa pengetahuan atau kemampuan peserta telah meningkat.

Keterbatasan tersebut perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil. Belum tersedianya data pretest-posttest, umpan balik terstruktur, maupun pengamatan penerapan pascakegiatan menyebabkan perubahan pemahaman peserta belum dapat dihitung secara kuantitatif. Demikian pula, penerapan hasil edukasi dalam program kerja, administrasi, dan tindak lanjut keputusan memerlukan pengamatan setelah Muswil. Pemisahan antara keterlaksanaan kegiatan, pembelajaran, penerapan, dan dampak sejalan dengan prinsip evaluasi pengembangan kapasitas yang menempatkan setiap tingkat hasil sebagai konstruk yang memerlukan bukti yang berbeda (Rucks et al., 2024).

Evaluasi pada kegiatan berikutnya dapat dikembangkan melalui pengukuran sebelum dan sesudah edukasi, umpan balik dari peserta, serta pemeriksaan dokumen yang dihasilkan setelah Muswil. Indikator penerapan dapat berupa tersedianya pembagian tugas, program kerja, kalender kegiatan, notula keputusan, register tindak lanjut, serta laporan pelaksanaan. Pendekatan tersebut memungkinkan efektivitas kegiatan dinilai berdasarkan perubahan pengetahuan sekaligus penerapan hasil pembelajaran dalam praktik organisasi.

Secara keseluruhan, substansi edukasi keorganisasian membentuk suatu proses yang saling berkaitan, mulai dari pemahaman tujuan organisasi hingga evaluasi dan tindak lanjut. Setiap tahapan memiliki keterkaitan karena tujuan organisasi menjadi dasar pembagian peran, sedangkan keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme organisasi perlu diterjemahkan ke dalam program kerja, didukung oleh administrasi yang tertib, dan dipertanggungjawabkan melalui proses evaluasi. Hubungan antartahap tersebut disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur Penguatan Tata Kelola Organisasi melalui Edukasi Keorganisasian
Sumber: Diolah oleh Tim Pengabdian, 2025.

Gambar 2 menunjukkan bahwa penguatan tata kelola organisasi berlangsung melalui tahapan yang saling berkaitan dan membentuk siklus yang berkelanjutan. Tujuan organisasi menjadi landasan dalam menentukan pembagian peran dan tanggung jawab pengurus, sedangkan keputusan organisasi menjadi dasar penyusunan program kerja. Pelaksanaan program kemudian didukung oleh administrasi yang tertib dan mekanisme akuntabilitas agar setiap kegiatan dapat didokumentasikan, ditelusuri, dan dipertanggungjawabkan.

Evaluasi dan tindak lanjut menjadi tahap untuk menilai pelaksanaan program, mengidentifikasi hasil dan kendala, serta menentukan langkah perbaikan. Hasil evaluasi selanjutnya menjadi umpan balik bagi organisasi untuk menyempurnakan arah, pembagian peran, dan program pada periode berikutnya. Dengan demikian, alur tersebut menegaskan bahwa edukasi keorganisasian diarahkan pada pembentukan siklus tata kelola yang sistematis, akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kegiatan edukasi keorganisasian pada Musyawarah Wilayah KKSS menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman mengenai tata kelola organisasi yang mencakup tujuan dan mandat kelembagaan, pembagian peran, pengambilan keputusan, penyusunan program kerja, administrasi, akuntabilitas, serta evaluasi dan tindak lanjut. Materi yang disampaikan menegaskan bahwa setiap unsur tersebut merupakan rangkaian yang saling berkaitan dalam mendukung pengelolaan organisasi secara sistematis. Keputusan yang dihasilkan melalui forum organisasi perlu diterjemahkan ke dalam pembagian tanggung jawab dan program kerja yang jelas, kemudian didukung dengan dokumentasi serta mekanisme pertanggungjawaban yang tertib.

Hasil kegiatan menunjukkan terlaksananya sesi edukasi keorganisasian serta terbentuknya kerangka penerapan tata kelola yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menindaklanjuti hasil Muswil. Namun, perubahan tingkat pemahaman peserta belum dapat dinilai secara kuantitatif karena kegiatan tersebut belum dilengkapi dengan instrumen *pretest-posttest* dan evaluasi pascakegiatan. Pengembangan kegiatan berikutnya perlu diarahkan pada pendampingan penyusunan program kerja, matriks pembagian tanggung jawab, register keputusan, penataan administrasi, serta pemantauan tindak lanjut. Evaluasi yang lebih terukur diperlukan agar perkembangan pengetahuan dan penerapan hasil edukasi dalam praktik organisasi dapat diketahui secara empiris.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), panitia Musyawarah Wilayah KKSS, serta seluruh peserta kegiatan yang telah memberikan ruang dan kesempatan bagi terlaksananya edukasi keorganisasian sebagai bagian dari rangkaian Muswil. Apresiasi disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan, baik dalam proses koordinasi, penyediaan fasilitas, maupun partisipasi selama kegiatan berlangsung. Dukungan dan keterlibatan tersebut menjadi bagian penting dalam terselenggaranya kegiatan pengabdian serta upaya mendorong penguatan tata kelola organisasi yang lebih sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourgeois, I., Lemire, S. T., Fierro, L. A., Castleman, A. M., & Cho, M. (2023). Laying a solid foundation for the next generation of evaluation capacity building: Findings from an integrative review. *American Journal of Evaluation*, 44(1), 29–49. <https://doi.org/10.1177/10982140221106991>
- Carman, J. G., & Millesen, J. L. (2023). Using self-assessments to improve board performance and build nonprofit capacity. *Journal of Public and Nonprofit Affairs*, 9(2), 124–146. <https://doi.org/10.20899/jpna.9.2.124.146>
- Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. (t.t.). Visi dan misi. KKSS. <https://kkss.id/visi-dan-misi/>
- Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239.
- Rucks, L., Wingate, L., López, M., Wilson Becho, L., FitzGerald, M., & Lis Dean, K. (2024). Leveraging the Kirkpatrick four-level model to evaluate evaluation capacity-building work. *New Directions for Evaluation*, 2024(183), 81–94. <https://doi.org/10.1002/ev.20619>